

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara selalu diikuti dengan perkembangan dari berbagai aspek yang terus meningkat pesat dan rumit. Seiring dengan perkembangan tersebut maka berbagai upaya dilakukan oleh setiap lembaga ataupun perusahaan untuk membenahi kinerjanya. Hal ini turut berdampak pada instansi-instansi pemerintah sebagai lembaga pemerintah yang bertujuan meningkatkan kinerja untuk melakukan penyesuaian terhadap perkembangan yang semakin pesat ini agar setiap tujuan dapat terlaksana dengan baik dan memperkecil resiko kesalahan yang dapat memperlambat kinerja.

Dalam lembaga atau organisasi akuntansi manajemen berperan untuk memfasilitasi terciptanya anggaran publik yang efektif, untuk itu perlu pengelolaan yang baik untuk mencapai tujuan. Anggaran sebagai alat manajemen untuk keperluan pengendalian manajemen mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Perkembangan ini diukur dari segi manfaat yang ingin diperoleh dari penggunaan sistem itu dalam pelaksanaannya. Semakin banyak dan rumit manfaat yang dituju, semakin banyak persyaratan yang dituntut di dalam pengelolaannya.

Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan (Wardoyo, 1980:41). Oleh karena itu pengelolaan sangatlah penting dalam proses penganggaran, karena dengan pengelolaan anggaran usaha-usaha perusahaan/lembaga akan lebih banyak berhasil dengan ditunjang oleh kebijakan-kebijakan yang terarah. Tujuan utama pengelolaan adalah untuk memberikan acuan proses umpan maju agar dapat memberikan arahan kepada setiap manager dalam pengambilan keputusan yang baik dan terencana serta menghindari penyimpangan yang tidak perlu.

Anggaran publik merupakan rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter berisi estimasi mengenai apa yang akan dilakukan organisasi dimasa yang akan datang. Anggaran belanja yaitu siklus bagi perusahaan atau

lembaga untuk membantu memberikan gambaran awal seberapa besar dana yang akan dikeluarkan untuk mewujudkan kegiatan tersebut yang dimonitori oleh pusat pertanggungjawaban sehingga penyimpangan-penyimpangan dapat diminimalisasi. Anggaran belanja tahunan harus sesuai dengan sasaran yang meliputi satu periode agar dapat mencapai sasaran rancangan yang telah ditetapkan.

Di dalam suatu anggaran belanja, kita harus memperhitungkan berbagai kondisi yang terjadi di berbagai perusahaan atau lembaga. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah merupakan lembaga pemerintahan yang berfungsi menyediakan jasa informasi statistik. Didalam kegiatan operasional Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah membutuhkan pengelolaan anggaran belanja yang pelaksanaannya terdiri dari tiga program generik yaitu program penyediaan pelayanan informasi statistik (PPIS), Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (DMPTTL), Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (PSPA).

Salah satu program BPS Provinsi Jawa Tengah adalah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (PSPA). PSPA adalah salah satu program BPS yang bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan sarana dan prasarana fisik yang ada di Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, antara lain kenyamanan dan kelengkapan fasilitas ruang kerja, serta penyediaan rumah dinas dan sarana transportasi untuk. Dengan demikian, pengelolaan anggaran belanja program peningkatan sarana dan prasarana (PSPA) ditetapkan adalah agar tersedianya fasilitas penunjang yang lebih memadai yang akan memberi suasana kerja yang nyaman sehingga akan sangat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan mendorong terciptanya kondisi yang dapat memacu prestasi kerja para pelaksana dalam melaksanakan tugasnya.

Berdasarkan uraian diatas terlihat jelas bahwa pengelolaan anggaran belanja yang baik merupakan peranan yang sangat penting dalam mendukung perusahaan maupun lembaga mencapai tujuannya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut yang berfokus pada bagaimana Sistem Pengelolaan Anggaran Belanja pada Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. Maka

melalui tugas akhir ini penulis mengambil judul “**Sistem Pengelolaan Anggaran Belanja PSPA pada Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah**”.

## **1.2 Ruang Lingkup**

Anggaran publik merupakan rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja. Berdasarkan peraturan pada BPS Provinsi Jawa Tengah pengelolaan anggaran belanja terbagi atas tiga program yaitu program penyediaan pelayanan informasi statistik (PPIS), Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (DMPTTL), Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (PSPA).

Agar karya tulis Tugas Akhir ini tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan, maka diperlukan pembatasan ruang lingkup penulisan. Dalam tugas akhir ini penulis membatasi hanya pada sistem pengelolaan anggaran belanja Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (PSPA). yang menitikberatkan pada mekanisme penggunaan anggaran, koordinasi dan hubungan tata kerja antar pelaksana anggarann, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran.

## **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan**

### **1.3.1 Tujuan Penulisan**

Tujuan adalah sasaran yang hendak dicapai setelah melakukan serangkaian kegiatan, seda ngkan tujuan dari disusunnya Tugas Akhir ini adalah:

1. Untuk membandingkan dan menerapkan teori yang diterima dibangku kuliah dengan praktik yang dilaksanakan di Kantor Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.
2. Untuk mengetahui dan memahami mengenai pengelolaan anggaran pada Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.

### **1.3.2 Kegunaan Penulisan**

Disamping mempunyai tujuan, laporan penyusunan Tugas Akhir Akhir ini memiliki kegunaan :

1. Bagi Mahasiswa

- a. Menambah pengetahuan mengenai pengelolaan anggaran pada Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.
  - b. Pembeding antara tinjauan teori dan praktik.
2. Bagi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah
    - a. Memperoleh masukan objektif yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, untuk meningkatkan kinerja instansi.
    - b. Sebagai sarana pengabdian masyarakat serta Negara khususnya dalam bidang pendidikan.
  3. Bagi Universitas Diponegoro
    - a. Sebagai bahan evaluasi pencapaian materi yang diberikan universitas kepada mahasiswa.
    - b. Dapat menjalin kerja sama dengan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.

#### **1.4 Metode Pengumpulan Data dan Jenis Data**

Metode pengumpulan data merupakan suatu cara atau proses yang sistematis dalam pengumpulan, pencatatan dan penyajian fakta untuk tujuan tertentu (Sumarsono S, 2004:66). Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan laporan ini, antara lain:

##### **1.4.1 Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan Tugas Akhir ini, meliputi :

##### **1. Wawancara**

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Metode wawancara yang dilakukan merupakan wawancara tidak terstruktur karena materi yang ditanyakan kepada responden adalah hal yang saat itu ada di lapangan. Data yang diperoleh berupa penjelasan mengenai gambaran umum mekanisme pelaksanaan anggaran belanja, program generik anggaran belanja, dan bagaimana koordinasi serta evaluasi dalam pengelolaannya secara lisan oleh Ibu Ummi Hastuti selaku Kepala Sub Bagian Bina Program, Ibu Dewi Umarakti selaku

Kepala Sub Bagian Keuangan dan Bapak Atas Nama Lubis selaku Kepala bagian Tata Usaha.

## 2. Studi Pustaka

Studi Pustaka adalah pengumpulan informasi dari berbagai sumber kepustakaan yang berhubungan dengan topik penelitian seperti buku, catatan, dan dokumen lainnya. Data yang diperoleh dari metode studi pustaka berupa Buku Pelaksanaan Kegiatan dan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, Perundang undangan yang berlaku serta referensi yang ada di perpustakaan yang berhubungan dengan topik masalah.

### 1.4.2 Jenis Data

Menurut sumbernya data terbagi menjadi dua, yaitu :

#### 1. Data Primer

Data Primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh organisasi yang menerbitkannya atau menggunakannya (Soeratno, 1993:7). Penulis memperoleh data primer dengan mengadakan wawancara dengan Kasubbag Bina Program, Kasubbag Keuangan dan Kabbag Tata Usaha.

#### 2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data pelengkap/tambahan yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi (Soeratno, 1993:76). Dalam hal ini penulis memperoleh data dari berbagai sumber yang ada, baik yang berupa buku literatur maupun bahan-bahan lainnya sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Data yang digunakan salah satunya adalah buku Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.

## 1.5 Sistematika Penulisan Laporan

Untuk memberikan gambaran tentang permasalahan yang akan dibahas secara keseluruhan, maka diperlukan suatu sistematika pembahasan. Adapun sistematika pembahasan tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

**BAB I: PENDAHULUAN**

menguraikan tentang latar belakang, ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, metode pengumpulan data dan jenis data, dan sistematika penulisan.

## **BAB II GAMBARAN UMUM INSTANSI**

menguraikan tentang sejarah singkat, kedudukan, tugas dan fungsi, visi dan misi, struktur organisasi BPS Provinsi Jawa Tengah.

## **BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTIK**

menguraikan tentang pengertian Pengelolaan, pengertian Anggaran Belanja, fungsi pengelolaan anggaran belanja, apa saja program anggaran belanja yang dilaksanakan BPS Provinsi Jawa Tengah, bagaimana susunan, tugas, wewenang serta tanggung jawab tiap organisasi dalam pengelolaan anggaran, bagaimana mekanisme penggunaan anggaran belanja BPS Provinsi Jawa Tengah, bagaimana koordinasi tata kerja antar pelaksana anggaran, bagaimana memonitoring dan evaluasi penggunaan anggaran belanja.

## **BAB IV PENUTUP**

merupakan rangkuman yang telah ditulis dari hasil pembahasan tinjauan teori dan praktik tentang pengelolaan anggaran belanja pada Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.